

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENURUNAN PENERIMAAN PPh ORANG PRIBADI  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
MEDAN TIMUR  
MEDAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**

**Oleh :**

**AS'ARI  
NIM : 058330085**



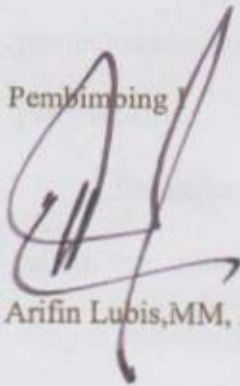
**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2009**

Judul Skripsi : Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penurunan Penerimaan PPh  
OP Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Medan  
Nama Mahasiswa : As'ari  
No Stambuk : 05 833 0085  
Jurusan : Akutansi

Mengetahui,

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Drs. H. Arifin Lubis, MM, Ak.

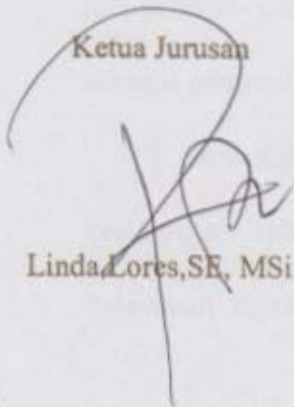
Pembimbing II



Hj. Sari Bulan Tambunan, SE, MMA

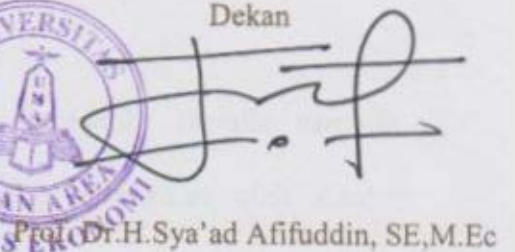
Mengetahui,

Ketua Jurusan



Linda Lores, SE, MSi

Dekan



Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, M.Ec.

## ABSTRAK



AS'ARI, "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENURUNAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR".  
Dibawah Bimbingan Drs. H. Arifin Lubis,MM,Ak. (Pembimbing I) dan Hj.Sari Bulan Tambunan,SE.,MMA. (Pembimbing II).

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah melalui peranan kantor pelayanan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dan untuk mencari alternatif pemungutan yang efektif untuk meningkatkan target penerimaan pajak penghasilan.

Sedangkan teknik analisis data untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan metode: 1) Metode Deskriptif, yaitu dengan memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan pajak penghasilan orang pribadi yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Medan. ; 2) Metode Analisis, yaitu dengan meneliti informasi yang ada menentukan suatu rencana guna pencapaian tujuan tertentu yang bermanfaat sebagai pemecahan masalah.

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Target yang telah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Medan tidak tercapai, hal ini terbukti

dengan adanya penurunan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Tahun 2006; 2) Kurangnya kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait dalam hal pertukaran data dan penyuluhan perpajakan, hal ini menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pembangunan di Kota Medan; 3) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat pajak bagi pembangunan sehingga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan pembangunan di Kota Medan



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT untuk segala berkah dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi berjudul "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Medan" bertujuan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian program pendidikan S-1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, terkait dengan adanya keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan penulis baik mengenai materi, teknik penyusunan, maupun analisisnya. Oleh karena itu, dengan hati terbuka penulis menerima setiap saran dan kritik dari pembaca sebagai saran yang berharga untuk penyempurnaan pada masa yang akan datang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih yang paling dalam kepada kedua orang tua yang tercinta. Skripsi ini kupersembahkan sebagai ungkapan terima kasih buat Ayah dan Mamak atas cinta dan kasih sayang, didikan dan dukungan baik moral dan material kepada penulis. Semoga ayah dan mamak selalu diberikan kesehatan dan umur yang berkah untuk dapat melihat keberhasilan penulis kelak. Amin.

Penulis juga mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.Sya'ad Afifuddin,S.E., M.Ec. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area;

2. Bapak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur beserta staff yang telah memberikan bantuan, saran kepada penulis untuk melakukan penelitian sebagai bahan penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Linda Lores,SE,MSi. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area;
4. Bapak Drs.Zainal Abidin,MH selaku ketua komisi pembimbing skripsi
5. Bapak Drs.H.Arilin Lubis.M.M selaku dosen pembimbing I;
6. Ibu Hj. Sarj Bulan T,SE,MM. selaku dosen pembimbing II;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf dan karyawan di Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area
8. Teman-teman di Jurusan Akuntansi dan Rekan-rekan seprofesi;
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan secara terperinci. yang telah membantu penulis sehingga terselesaikan tugas akhir ini dengan baik

Semoga penulisan skripsi ini akan berguna dan bermanfaat bagi para pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, 2009

Penulis,

As'ari  
NPM. 058330085

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II     LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Teori – Teori.....	5
1. Pengertian, Fungsi dan Penggolongan Pajak.....	5
2. Jenis-Jenis dan Tata Cara Pemungutan Pajak.....	13
3. Penghapusan Utang Pajak.....	18
4. Kebijakan dan Dasar Hukum Pemungutan Pajak.....	19
5. Sanksi Perpajakan.....	21
6. Pajak Penghasilan dan Lapisan Tarif.....	23
B. Kerangka Konseptual.....	28

	C. Hipotesis.....	28
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
	B. Populasi dan Sampel.....	30
	C. Defenisi Operasional.....	31
	D. Jenis dan Sumber Data.....	31
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
	F. Teknik Analisa Data.....	32
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Hasil.....	34
	B. Pembahasan.....	38
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan.....	47
	B. Saran.....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi .....	37
-------------------------------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Lapisan Tarif PPh OP.....	28
Tabel 2. Lapisan Tarif PPh Badan.....	29
Tabel 3. Waktu Penelitian.....	33
Tabel 4. Jabatan Struktural .....	35
Tabel 5. Golongan .....	35
Tabel 6. Tingkat Pendidikan.....	36
Tabel 7. Kedinasan.....	36
Tabel 8. Perbandingan Target dan Realisasi PPh OP.....	38



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sasaran pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, merata baik material maupun spiritual. Dalam mewujudkan suatu pembangunan yang dicita-citakan, diperlukan sarana maupun prasarana yang dapat berupa sumber daya manusia, pengetahuan atau teknologi, situasi politik yang mantap dan dana yang memadai. Dalam hal memenuhi kebutuhan dana yang memadai guna pembiayaan pembangunan nasional, pemerintah mempunyai sumber-sumber penerimaan negara baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Salah satu contoh penerimaan yang berasal dari dalam negeri yang sangat penting dan potensial sekali untuk membiayai pembangunan nasional adalah dari sektor pajak.

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Masyarakat yang hidup dalam suatu negara pasti akan berurusan dengan pajak, sebab membayar pajak merupakan suatu bentuk tanggung jawab warga

negara dalam menjalankan kehidupan bernegaranya. Maka dari itu diharapkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta terlibat dalam pembangunan yang semakin meluas dan semakin banyak kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara yang dibutuhkan.

Sekarang ini kemampuan suatu daerah dalam memperoleh dana bagi pembangunan juga dituntut lebih baik, sehingga semua orang berdomisili di Indonesia dapat dijadikan sebagai subyek pajak jika orang tersebut memperoleh penghasilan di Indonesia, sedangkan yang berdomisili di luar negeri hanya dapat dijadikan subyek pajak jika mempunyai hubungan dengan Indonesia (memperoleh penghasilan).

Upaya wajib pajak untuk menghindari kewajiban pajak baik dengan melanggar maupun tidak melanggar undang-undang dirasa perlu dikurangi agar penerimaan pajak negara akan terus menunjukkan peningkatan. Peran serta masyarakat wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, namun kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban pajak sebagaimana mestinya.

Penulis berusaha menguraikan masalah faktor-faktor wajib pajak enggan membayar kewajiban pajaknya, karena penulis beranggapan kalau sistem perpajakan di Indonesia baik dan wajib pajak sadar di dalam membayar kewajiban pajaknya maka penerimaan negara dari sektor pajak dapat dioptimalkan untuk membangun bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana, Lilis Setiawati. **Perpajakan Indonesia**. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta. 2004
- Early Suandy, **Perencanaan Pajak**. Edisi Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. 2008
- Mardiasmo. **Perpajakan**. Edisi Keempat. Cetakan Pertama. Penerbit Andy Offset. Yogyakarta. 1997
- Muda Markus, **Perpajakan Indonesia**. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 2005
- Munawir, S. **Perpajakan**. Penerbit Liberty. Yogyakarta. 1997
- Surachmad, W. **Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik**. Edisi II. Tarsito. Bandung. 1990
- Tjahjono, Achmad dan Muhammad F. Husain. **Perpajakan**. Edisi Pertama. Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta. 1997
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang Perpajakan No. 16 Tahun 2000 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.